

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *et al.*, *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2008.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Damanik, Khaeril Ikhwan, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan 1. Bandung: Nusa Media, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Junadi, Yudi. *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, Cetakan Pertama. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Kerjasama Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2018. Kota Tasikmalaya: BPS, 2018.
- Kerjasama Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik, Provinsi Bali Dalam 2018. Provinsi Bali: BPS, 2018.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2006.

- Muntoha. *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010).
- Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik/*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Salim, Arskal. *Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM*, Cetakan I. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Simanjuntak, Antonius Bungaran (editor). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Suaedy, Ahmad dkk. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- SLS. Danuredjo. *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Laras, 1967.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Cetakan ke-4. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Yentriyani, Tim Penyusun Andy, dkk. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*

_____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 246.*

_____. *Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.*

_____. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung.*

C. Jurnal

Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3, Juli-September 2014 ISSN 1978-5186, hal.410 (410-423).

Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. x-xi.

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hal. 90.

Hoessein, Benyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah". *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*. No.1/Vol.1/Juli, Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2002, hal.16.

Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari 2006, hal. 29.

Na'imah, Hayatun. "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), hal. 154 (151-167).

_____. "Lahirnya Perda Berbasis Syari'ah di Provinsi Kalimantan Selatan". SYARIAH, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hal. 25 (25-32).

D. Internet/Skripsi/Tesis/Makalah

Adiyudha, Rizkyan, "Grace Natalie Jelaskan Mengapa PSI Tolak Perda Religi" <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/17/picex5409-grace-natalie-jelaskan-mengapa-psi-tolak-perda-religi>, diakses 7 Juli 2019.

Alynudin, Zuhud. "Silang Pendapat Perda Bernuansa Agama: Kemunculan peraturan daerah bernuansa agama jadi salah satu isu yang menyedot perdebatan di tengah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019". https://kbr.id/nasional/11-2018/silang_pendapat_perda_bernuansa_agama/98211.html, diakses 7 Juli 2019.

Anonim, "Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara", <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=54564>, diakses 25 Maret 2019.

Azra, Azyumardi. "Perda Agama", Koran *Kompas*, Rabu, 28 November 2018.

Azzahra, Diazih. "Hubungan Antara Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Dengan Akhlak Peserta Didik Kelas 4 di MI Negeri Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2016, hal. 17

Armawi, Armaidly, "Mengkaji Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ketuhanan", Ringkasan Disertasi, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s7zIO42WIGoJ:https://ugm.ac.id/id/berita/1286-mengkaji-nilai-nilai.kemanusiaan.dan.ketuhanan.armaidly.armawi.raih.doktor+%&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses 24 April 2019.

Bachri, Syamsul. "Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah", (Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar, 1999).

Bagir, Zainal Abidin dalam Ahmad Muawal Hasan, “Perda Syariah: Jualan Elite Politik, Dagangan Partai Sekuler”, <https://tirto.id/dajm>, diakses 7 Juli 2019.

Harun, Refly. “Silang Pendapat Perda Bernuansa Agama”, https://kbr.id/nasional/11-2018/silang_pendapat_perda_bernuansa_agama/98211.html, diakses 7 Juli 2019.

<https://kbbi.web.id/keagamaan>

<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1065>

<https://jdih.tasikmalayakota.go.id/home/profil/visimisi>

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/wp-content/uploads/2018/02/geografi.pdf>

Kaelan. ”Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila”. *Makalah*. Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2009.

Mahendra, Yusril Ihza. “Secara Substansial, Perda Syariah Wajar Sesuai Kesadaran Hukum”, <https://kumparan.com/@kumparannews/yusril-secara-substansial-perda-syariah-wajar-sesuai-kesadaran-hukum-1542864489600987386>, diakses 6 Agustus 2019.

Suwandi, Made. “Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia”, *Makalah*, Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otda Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, 2002.

Raharjo, Wasito. “Terus Menuai Konflik, Perlukan Perda Berbasis Agama Diterapkan?”, <http://www.aspirasionline.com/2018/12/terus-menuai-polemik-perlukah-perda-berbasis-agama-diterapkan/>, diakses 7 Juli 2019.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.